

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang sangat penting yakni sebagai tolak ukur kemajuan negara tersebut. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Saat ini Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan di segala bidang. Guna memenuhi sumberdaya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu negara telah membuat kebijakan yang mengatur tentang pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....” secara tegas pembukaan UUD 1945 telah mencantumkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia yakni melalui pendidikan. Selanjutnya dalam UUD 1945 pasal 31 dinyatakan bahwa:

- (1) Tiap –tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kehidupan bernegara telah menjamin hak warga negara untuk memperoleh pengajaran/pendidikan dan menuntut pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun tujuan dari pendidikan nasional menurut Panduan Pendidikan Karakter SMP Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2010 adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dilihat dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dapat dipahami bahwa pendidikan di setiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu menjadi insan yang beretika, bermoral, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan karakter memegang peranan penting guna memajukan peradaban suatu negara. Menurut Kemendiknas (2010:2):

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.

Jadi, pendidikan karakter adalah sistem yang dirancang guna menanamkan nilai-nilai karakter kepada seluruh warga sekolah yang meliputi berbagai komponen pengetahuan, kesadaran dan kemauan, serta tindakan untuk melaksanakan nilai karakter tersebut, baik terhadap sang pencipta, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan sekitar maupun bangsanya sehingga tumbuh menjadi insan kamil. Dalam Panduan Pendidikan Karakter SMP Kemendiknas (2010:2) juga disebutkan bahwa:

Pendidikan di sekolah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau

kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Dari pemaparan diatas maka, pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik di sekolah apabila ada partisipasi dari semua komponen mulai dari komponen pendidikan, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Selain itu dari segi internal pendidikan karakter bisa berjalan apabila didukung oleh kurikulum serta penanganan setiap mata pelajaran oleh guru yang profesional di dalam bidangnya. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana pendidikan karakter di sekolah dapat terwujud.

Dalam usaha meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Bentuk dan susunan karakter dalam konteks keseluruhan proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and Emotional Development*), Olah Pikir (*Intellectual Development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and Kinesthetic Development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity Development*). Sehingga pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada *grand design* tersebut.

Setiap kebijakan selalu memiliki dasar hukum. Dasar hukum adalah landasan berpijak dalam mengembangkan pendidikan karakter. Adapun dasar hukum dalam pembinaan pendidikan karakter antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Permendiknas No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 5) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- 6) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- 7) Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
- 8) Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014;
- 9) Renstra Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2010 – 2014.
(Kemendiknas 2010:6).

Pendidikan karakter pada jenjang SMP dapat dimasukkan dalam pembelajaran melalui nilai-nilai yang terkandung pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran pengetahuan, tetapi menyentuh pada penghayatan, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk pribadi peserta didik, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya

masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda saat ini. Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai *the golden rule*. (Kemendiknas 2010:9).

Sesungguhnya pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila sesuai dengan landasan dari nilai-nilai karakter dasar. Nilai-nilai karakter dasar tersebut adalah nilai hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam Panduan Pendidikan Karakter SMP tahun 2010 disebutkan bahwa, beberapa nilai karakter dasar adalah sebagai berikut: cinta kepada Allah SWT dan ciptaan-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab, kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa nilai karakter dasar adalah serangkaian sikap positif yang dimiliki oleh setiap manusia. Adapun penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak kepada nilai-nilai

karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi serta disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri. Berdasarkan *grand design*, secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.

Pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran di sekolah adalah pengenalan nilai-nilai, sarana memperoleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan pendalaman nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan mendalami nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. (Kemendiknas 2010:18).

Jadi, pendidikan karakter yang diterapkan secara terpadu dalam pembelajaran di sekolah merupakan serangkaian proses pembelajaran tentang nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran yang bertujuan menjadikan peserta didik disamping mampu menguasai materi namun juga dapat mendalami serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam struktur kurikulum SMP, pada dasarnya setiap mata pelajaran memuat materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Namun secara substantif, setidaknya terdapat dua mata pelajaran yang terkait langsung dengan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia (pendidikan karakter), yaitu pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kedua mata

pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang secara langsung (eksplisit) mengenalkan nilai-nilai, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menghayati nilai-nilai pendidikan karakter. Integrasi pendidikan karakter pada mata-mata pelajaran di SMP mengarah pada pendalaman nilai-nilai di dalam tingkah laku sehari-hari melalui proses pembelajaran dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pendidikan karakter pada hakikatnya memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan nilai-nilai moral dan pendidikan akhlak yang secara eksplisit terangkum dalam pembelajaran PKn. Pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) di SMP telah memuat mengenai pendidikan karakter, hal ini dapat ditunjukkan dengan tiga komponen penting yang dikembangkan dalam PKn yakni *civic knowledge* bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, *civic skills* bertujuan untuk membentuk warga negara yang berpikir kritis dan berpartisipasi serta, *civic disposition* yang bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai Pancasila dan UUD 1945 dan dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang menjadikan pendidikan karakter sebagai tujuan pembelajaran dan pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja atau direncanakan (*instructional effect*) bukan sekedar dampak ikutan atau pengiring (*nurturant effect*) seperti mata pelajaran yang lain.

Kenyataanya, pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tataran pengenalan norma atau nilai-nilai, belum pada tataran pendalaman (penghayatan) dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa belum semua sekolah mampu menyelenggarakan pendidikan karakter sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pihak-pihak yang seharusnya membantu penyelenggaraan pendidikan karakter, belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal.

Dewasa ini banyak terjadi fenomena sosial yang cenderung bersifat negatif, salah satunya adalah meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal, kriminalitas remaja dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Fenomena yang berkembang belakangan ini di Kecamatan Purworejo khususnya terkait dengan kenakalan pelajar SMP, dapat dikategorikan dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dari pengamatan peneliti ditemukan beberapa fakta antara lain, banyak ditemukan kasus fandalisme di lingkungan publik yang dilakukan oleh siswa SMP, perkelahian antar pelajar SMP, serta penyalahgunaan teknologi informasi misalnya, dari razia yang dilakukan oleh pihak sekolah banyak terjaring pelajar yang menyimpan gambar dan video porno di *handphone* mereka, dari beberapa kasus diatas menunjukkan adanya kemerosotan moral pelajar di Kecamatan Purworejo yang memerlukan penanganan serius dari pihak sekolah, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Untuk

itu pendidikan karakter memiliki peran yang esensial guna menanggulangi krisis dekadensi moral pelajar di Kecamatan Purworejo.

Dari hasil kegiatan praobservasi, peneliti menemukan fakta bahwa sebagian besar guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada beberapa SMP Negeri di Kecamatan Purworejo yang meliputi SMP Negeri 1 Purworejo, SMP Negeri 2 Purworejo, SMP Negeri 4 Purworejo dan SMP Negeri 6 Purworejo memahami pendidikan karakter namun, belum menerapkannya secara tepat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain karena guru mata pelajaran PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo sebagian besar belum memperoleh bimbingan teknis (BINTEK) mengenai pendidikan karakter, dari empat SMP Negeri di Kecamatan Purworejo baru ada satu sekolah yang memperoleh bimbingan teknis mengenai pendidikan karakter yakni SMP Negeri 2 Purworejo. Karena belum semua guru mata pelajaran PKn memperoleh BINTEK pendidikan karakter maka, pemahaman guru tentang pendidikan karakter dirasa masih kurang. Guru mata pelajaran PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo juga menemui kendala dalam mengembangkan dan menerapkan (mengimplementasikan) pendidikan karakter pada mata pelajaran PKn, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Selain itu dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) kebanyakan guru masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah dalam menyampaikan materi, sehingga kegiatan belajar mengajar cenderung mengarah pada *teacher centered* bukan *student centered* hal ini dapat menyebabkan

peserta didik menjadi kurang antusias dalam mengikuti KBM di kelas. Di sisi lain implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari peserta didik belum nampak, ini dikarenakan penerapan pendidikan karakter yang mereka dapatakan di sekolah belum maksimal.

Berbagai fenomena diatas mengindikasikan bahwa pengembangan mata pelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo perlu didukung oleh kompetensi guru yang handal. Karena kompetensi adalah hal mutlak yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan kinerjanya secara maksimal. Dengan adanya hal tersebut peneliti merasa perlu menuliskan tentang kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Guru mata pelajaran PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo sebagian besar kurang memahami pendidikan karakter hal ini dikarenakan belum mendapatkan bimbingan teknis (BINTEK) mengenai pendidikan karakter untuk mata pelajaran PKn SMP.

2. Kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter belum sepenuhnya memenuhi kriteria kompetensi guru profesional.
3. Guru menghadapi kendala dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter.
4. Guru menghadapi kendala dalam penerapan (implementasi) pendidikan karakter pada mata pelajaran PKn.
5. Implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari peserta didik belum begitu nampak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, karena keterbatasan waktu dan diharapkan penulisan dapat lebih efektif dan efisien maka dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi masalah pada kompetensi Guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi Pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo. Alasan peneliti memilih topik mengenai kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi Pendidikan Karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo karena, mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang secara eksplisit memuat pendidikan karakter dan mata pelajaran PKn adalah ujung tombak pendidikan karakter. Keberhasilan pendidikan karakter peserta didik sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran baik di kelas maupun diluar kelas. Adapun lokasi penelitian di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo

hal ini dikarenakan SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo merupakan sekolah-sekolah unggulan yang menjadi favorit di Kota Purworejo dan sekitarnya sehingga, dapat dijadikan barometer dalam dunia pendidikan di Kabupaten Purworejo khususnya di tingkat SMP. Alasan lain peneliti memilih topik mengenai kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo karena pada tahun 2010 pemerintah pusat sedang mencanangkan program Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang memuat pendidikan karakter sebagai misi pembangunan nasional, kemudian Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia juga mencanangkan program mengenai pendidikan karakter yakni Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2010-2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara umum. Hal ini relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi guru dalam mengembangkan PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP negeri se-Kecamatan Purworejo?
2. Bagaimana implementasi pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP negeri se-Kecamatan Purworejo?

3. Kendala apa saja yang dihadapi guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo?
4. Apa saja solusi yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala-kendala mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan mencapai beberapa tujuan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi Pendidikan Karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo.
4. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi kendala mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi di dalam pengembangan PKn yang berdimensi pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Serta penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian mengenai pendidikan karakter selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama atau masalah lain yang berkaitan.

b. Bagi Guru

Dapat dijadikan sebagai masukan positif mengenai implementasi pendidikan karakter pada mata pelajaran PKn di SMP.

G. Batasan Pengertian

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian. Untuk itu perlu diberi definisi istilah dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi Guru

Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran (UU Nomor 14 tahun 2005/UUGD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 dinyatakan bahwa :

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

2. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut Nu'man Somantri dalam (Cholisin, 2004: 8), PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir

kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. Pendidikan karakter

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Menurut *grand design* pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Kemendiknas tahun 2010, pengertian pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Sedangkan pengertian “karakter” menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. (Kemendiknas 2010:8).

Jadi dapat dirumuskan bahwa pengertian dari judul penelitian ini adalah kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo. Dalam hal ini

kompetensi guru yang dimaksud sesuai dengan kriteria guru profesional yang meliputi empat kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter. Adapun peneliti tidak menggunakan semua indikator kriteria guru profesional, namun peneliti hanya menggunakan indikator yang sesuai dengan konteks judul penelitian yakni kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn yang berdimensi pendidikan karakter di SMP Negeri se-Kecamatan Purworejo.